

# GERAKAN TUNGKU API KEHIDUPAN: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOMORO DI KAMPUNG OTAKWA

Budi Nahiba  
Albertus Heriyanto

**Abstract:** In socio-economic horizons, the life of the Komoro-Sempan people in the village of Otakwa is food-gatherer. The society is mainly characterized by consumptive attitude that foods gathered today are consumed immediately. People base their lives on the abundance of natural resources by hunting animals such as fish, crab, shellfish, or by gathering wild plant foods such as fruits, vegetables, nuts and so on. Actually, these natural resources could be sold in the city of Timika, the only downtown in that area, but the people face another difficult due to the transportation to the city which reversely brings about costly life in the village.

Basically, people of Otakwa are very enthusiastic to the economic program of Furnace of Life Movement, particularly of the trainings such as net-making, fish-smoking and money-saving. That program is very important for increasing the growth of economic welfare of the people in the coastal area of Mimika. In this case, the employees of Koperasi Maria Bintang Laut and PT. Freeport Indonesia need to pay much attention to the anthropological and sociological aspects of the people of Komoro-Sempan in order to avoid clashes between the program and the local culture of the people.

**Keywords:** gerakan tungku api kehidupan • ekonomi • nelayan • Kamoro-Sempan • Orang Asli Papua •

Pada tahun 2017, almarhum Mgr. John Philip Saklil, Uskup Keuskupan Timika, mencanangkan gerakan pastoral baru yang disebutnya sebagai Gerakan Tungku Api Kehidupan. Gerakan ini bertujuan melakukan perlindungan terhadap masyarakat asli di seluruh Keuskupan Timika untuk mengelola sumber-sumber perekonomian mereka. Gerakan ini dilatarbelakangi oleh potret kemiskinan masyarakat pemilik hak ulayat akibat pertambahan penduduk di wilayah perkotaan, masuknya investor yang mengambil alih untuk pertambangan yang hanya menyisakan *tailing* bagi masyarakat lokal, investor perkebunan yang semena-

mena membat hutan sagu dan menggantinya dengan sawit, dan sebagainya. Di lain pihak, masyarakat lokal seolah memperlakukan rawa dan hutan mereka sebagai lahan tidur yang tidak produktif, dan dengan mudah dipengaruhi untuk melepas hak ulayatnya dan menjual lahan warisan leluhurnya.

Mgr. John mengimbau umat Katolik agar menjadikan tanah warisan leluhurnya sebagai tungku api yang terus menyala dan memberikan kesejahteraan bagi keluarga dan seluruh masyarakat dan bangsa. Keluarga sebagai basis komunitas terkecil diharapkan menjadikan tungku api itu sebagai pusat kehidupan umat. Salah satu perwujudan Gerakan Tungku Api Kehidupan di seluruh wilayah Keuskupan Timika, Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE), mendirikan Koperasi Maria Bintang Laut (KMBL). Berbagai program ditawarkan kepada paroki atau pun stasi sesuai kebutuhan serta situasi dan kondisi masing-masing.

Stasi Mimika Timur Jauh, khususnya Kampung Manasari dan Kampung Otakwa menjadi salah satu stasi yang mendapatkan bagian program Gerakan Tungku Api Kehidupan Komisi PSE tersebut. Gereja Keuskupan Timika mau hadir dan solider dengan situasi dan kondisi umat, sesuai dengan potret kehidupan masyarakat Kamoro-Sempan, khususnya dalam menangani masalah ekonomi masyarakat.

Program Komisi PSE itu antara lain penanaman buah durian, rambutan, sagu, pelatihan pembuatan perahu dan perbaikan motor tempel, pelatihan perbaikan jaring ikan, pelatihan manajemen keuangan keluarga, pelatihan pembuatan ikan asin, pelatihan perbaikan genset, dan membangun sentra pengelolaan hasil tangkapan masyarakat, khususnya ikan. Untuk mengkoordinir program tersebut didirikanlah Koperasi Maria Bintang Laut. Koperasi juga membuka sentra pembelian ikan masyarakat di Otakwa dan Manasari, yang kemudian dikenal sebagai 'sentra penimbangan ikan'. Koperasi membeli ikan dari para nelayan dengan harga yang lebih tinggi daripada para tengkulak. KMBL dalam hal ini bekerja sama dengan para petugas Gereja untuk mensosialisasikan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pertemuan komunitas basis di stasi maupun melalui pengumuman di gereja pada Ibadat Hari Minggu.

Beberapa masalah yang hendak diuraikan dalam tulisan ini ialah:

- Bagaimana latar belakang kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kamoro-Sempan di Kampung Otakwa? Apa persoalan yang mereka hadapi?

- Bagaimana cara Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) dalam memberdayakan kaum nelayan? Apakah program tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kampung Otakwa?
- Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap program-program dalam Gerakan Tungku Api Kehidupan?

### **Gerakan Tungku Api Kehidupan**

Uskup Keuskupan Timika, Mgr. John Philip Saklil dalam arahan umum rapat pimpinan Keuskupan Timika, pada 13 Februari 2017, antara lain mengatakan:


“Lebih baik tidak punya uang daripada tidak punya dusun. Gerakan melindungi dan mengelola sumber hak hidup ekonomi masyarakat lokal menjadi gerakan bersama semua pihak yang peduli. Dusun yang dilindungi dan dikelola dapat menghasilkan uang untuk kebutuhan hidup. Bukan sebaliknya uang hasil penjualan dusun.”

Melalui arahan itu, Mgr. John Philip Saklil berharap Keuskupan Timika berperan membantu masyarakat melindungi dan mengelola sumber-sumber kehidupan mereka, melalui program pengembangan pastoral sosial ekonomi baru yang disebut Gerakan Tungku Api Kehidupan.

Gerakan Tungku Api Kehidupan itu diharapkan dapat menjadi gerakan bersama keuskupan-keuskupan se-Regio Papua. Sebagai inisiator, Mgr. John juga memperkenalkan gerakan tungku api itu secara nasional dalam pertemuan Konpernas KWI pada 2017 (Loke, 2019: 33). Selaku Ketua PSE-KWI, Mgr. John menggaungkan Gerakan Tungku Api itu dalam skala nasional. Menurutnya, melindungi dan mengelola sumber hak hidup ekonomi masyarakat lokal perlu menjadi arah dasar gerakan kerasulan PSE KWI yang baru (Saklil, 2018: 3; Komisi PSE KWI, 2018).

Istilah “tungku api” digunakan sebagai simbol kesejahteraan hidup keluarga dan masyarakat adat Papua. Tungku api adalah bagian penting dalam rumah, khususnya di dapur. Api yang dihasilkan dari pembakaran beberapa potong kayu di tungku, digunakan untuk pelbagai kepentingan antara lain memasak makanan. Rumah yang berasap menandakan tungku apinya menyala, dan tungku api yang bernyala menandakan adanya aktivitas dalam rumah.

Mgr. John (Saklil, 2017: 178) kemudian memperluas makna istilah “tungku api” tersebut. Ia menggunakan istilah tungku api sebagai simbol terlindung dan terkelolanya sumber daya alam yang menjamin kebutuhan



dan kesejahteraan hidup masyarakat adat. Alam telah menyediakan hutan, tanah, sungai, rawa, dan laut serta segala isinya yang dapat diolah dan disajikan untuk kesejahteraan hidup manusia. Sekarang, bagaimana manusia mengelolanya? Mgr. John menegaskan banyaknya tungku api yang bernyala itu menandakan adanya pengelolaan dan pemanfaatan alam untuk kebutuhan hidup manusia setiap hari. Tungku api akan terus menyala kalau kekayaan sumber alam itu dijaga, dirawat, dan diolah dengan layak dan bermartabat untuk kehidupan dan kesejahteraan manusia.


Menurut Mgr. John (Saklil, 2017: 179), pengertian tungku api juga berlaku bagi dusun karena dusun sebagai tempat mengelola hasil yang diperoleh dari tanah, hutan, sungai, rawa, laut yang menjadi milik masyarakat adat pemilik dusun. Tungku api akan terus menyala sejauh dusun dijaga dan digunakan sebagai sumber kesejahteraan hidup masyarakat adat. Kekayaan alam di dusun bukan hanya menjamin kehidupan manusia tetapi juga memberi kehidupan bagi segala jenis makhluk hidup di darat, laut, dan udara.

Untuk melindungi sumber daya alam masyarakat adat, khususnya wilayah dusun produktif, perlu dukungan pemerintah agar tidak dimonopoli oleh para pemilik modal. Perlindungan atas hak sumber daya alam masyarakat itu perlu pengakuan secara legal atas hak masyarakat pemilik hak ulayat agar sumber ekonomi dusun mereka tidak digunakan semena-mena dan mengorbankan pemilik dusun. Untuk itu, penguatan lembaga adat menjadi hal mendasar dalam proses perlindungan dan pengawasan sumber daya alam masyarakat adat (Saklil, 2017: 181).

Menurut Mgr. John (Saklil, 2017: 182) dalam pengelolaan sumber daya alam yang telah berlangsung secara tradisional, masyarakat adat perlu didukung oleh pemerintah dan pihak-pihak yang peduli untuk menjamin akses mereka atas tanah ulayatnya dan agar pengelolaan dusun itu lebih efektif dan produktif. Dukungan tersebut sangat penting karena sering masyarakat adat tidak mampu mengelola sumber daya alamnya. Sebagai dampak ketidakmampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam tersebut, sering terjadi masyarakat menjual kekayaan alamnya kepada pihak lain. Di lain pihak, kemudahan diperolehnya bantuan langsung dari pemerintah makin melemahkan aktivitas dan kreativitas masyarakat lokal untuk mengelola kekayaan alamnya sendiri. Akibatnya, sumber-sumber ekonomi dari kekayaan alam setempat semakin dikuasai oleh para pengusaha dan pemerintah yang bukan masyarakat setempat.

Mgr. John (Saklil, 2017: 180) melihat bahwa perubahan zaman telah mengakibatkan sumber kehidupan berupa kekayaan alam di dusun dan





kelestarian ekosistem hutan itu semakin terancam hilang. Di tengah perubahan tersebut, masyarakat adat belum mampu menjamin kebutuhan hidupnya dengan cara baru karena sebagian besar masih tergantung pada sumber-sumber kekayaan alam.

Di daerah perkotaan, khususnya di kota-kota kabupaten, tanah dan dusun masyarakat adat nyaris terjual habis untuk kepentingan pembangunan fasilitas umum dan pemukiman, akibat pertambahan penduduk dari luar yang terus meningkat secara drastis. Di luar perkotaan, pemerintah mengizinkan investasi para pengusaha luar secara besar-besaran untuk melakukan *logging*, membuka perkebunan, persawahan dengan melakukan penebangan hutan secara besar-besaran serta menghadirkan perusahaan tambang. Yang tidak asing bagi kita, misalnya di pengelolaan hutan jangka panjang dan tambang PT. Freeport di Mimika, atau pun tambang emas ilegal di Kabupaten Nabire (Yulianto, 2019).

Mgr. John sangat prihatin dengan sering terjadinya krisis pangan dan kerusakan ekologi saat ini. Menurutnya, hal itu tampak dalam perubahan iklim, rusaknya sumber-sumber pangan, dan rendahnya produksi bahan pangan oleh masyarakat lokal. Akibatnya, munculnya aneka macam penyakit yang disebabkan oleh gizi buruk, rentannya daya dukung lingkungan, dan meningkatnya jurang antara si kaya (yang umumnya kaum pendatang) dan si miskin (yang umumnya masyarakat lokal).

Di lain pihak, Mgr. John (Saklil, 2017: 180) menandakan bahwa manusia sering tidak puas dengan dirinya. Hal itu tercermin dalam ketidakserasian hubungan antara manusia dengan sesamanya, dan dengan alam ciptaan. Sesungguhnya manusia bebas memilih apa yang baik dan cocok bagi hidup mereka, namun manusia justru cenderung saling berebut harta dan kekuasaan. Manusia dengan rakusnya menguras kekayaan alam dengan tidak hormat dan tidak bermartabat. Manusia seolah tidak pernah puas dengan apa yang ada padanya. Untuk itu Mgr. John mendesak agar manusia mau merubah diri untuk memahami dirinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi yang bisa menjadi penjaga kehidupan.

Karena terancamnya sumber daya hutan, rawa, tanah, air, dan berbagai kekayaan alam dusun adat yang semakin menipis, Gerakan Tungku Api Kehidupan diharapkan dapat menjadi gerakan pembaru dalam usaha perlindungan dan pengelolaan sumber hidup masyarakat asli.

## Arah Dasar Gerakan Tungku Api Kehidupan

Mgr. John mengingatkan bahwa Gerakan Tungku Api Kehidupan bukanlah gerakan yang tanpa dasar. Untuk itu ia menjelaskan fundasi gerakan tersebut dengan memberi beberapa tinjauan yaitu tinjauan teologis-spiritual, tinjauan hukum dan perundang-undangan, sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.


### *Tinjauan Teologis-Spiritual*

Dalam Kitab Kejadian (Kej 1: 27), dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan citra-Nya. Gambar dan citra Allah ini diwujudkan oleh manusia dalam kebersamaannya dengan Allah untuk ikut menata, menjaga, memelihara, dan mengembangkan bumi dan segala isinya untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama dan keberlangsungan keutuhan ciptaan. Sebagai citra Allah, manusia mempunyai martabat sebagai pribadi yang mampu mengenal diri, menyadari kebersamaan dirinya dengan orang lain, dan bertanggung jawab atas makhluk ciptaan yang lainnya. Allah memberi kepercayaan kepada manusia untuk memelihara dan mengolah alam semesta dengan bijaksana serta berupaya menciptakan hubungan yang harmonis di antara semua ciptaan (bdk. Nota Pastoral KWI, 2013).

Perutusan dan panggilan Gereja mendasarkan diri pada spiritualitas inkarnatoris-transformatif yang berpangkal pada misteri penjelmaan Allah dalam hidup manusia (Saklil, 2017: 183-184). Kehadiran Sabda yang menjadi manusia (=inkarnatoris,<sup>1</sup> bdk. Yoh 1: 14) mengarahkan manusia untuk cerdas dan kreatif mewujudkan nilai-nilai kemanusiannya dalam menjaga dan memelihara keutuhan ciptaan serta dalam melindungi dan mengelola sumber daya alam. Dengan peristiwa inkarnasi, Firman Allah menunjukkan soli-daritas dengan manusia, “mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia” (Fil. 2: 7). Spiritualitas inkarnatoris Allah itu mengajarkan pada kita pentingnya semangat bela rasa kepada manusia yang menderita (Mat 9: 36). Selain itu, kita didorong untuk berusaha hidup baru dengan membawa kabar baik bagi orang miskin, pembebasan bagi tawanan, penglihatan bagi orang buta, dan pembebasan bagi orang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang (Luk. 4: 18).

---

<sup>1</sup>Arti kata dari inkarnatoris adalah keyakinan bahwa demi penyelamatan dunia, Putra Allah yang sepenuhnya ilahi sungguh-sungguh menjadi manusia (O’Collins, 1996: 118).



Sikap dan perilaku terhadap lingkungan hidup harus mencerminkan keyakinan bahwa seluruh alam ciptaan adalah baik dan bernilai pada dirinya. Tugas perutusan khusus manusia untuk bertanggung jawab dalam melindungi dan mengelola bumi dan segala isinya tidak dapat dijalankan oleh manusia serakah yang tak mengenal pengorbanan, kenosis, penyerahan diri bagi manusia dan seluruh ciptaan, seperti yang dilakukan Yesus. Dalam hal ini, Yesus dapat menjadi model bagi manusia untuk mengembangkan perilaku yang ramah lingkungan, sesuai seruan Paus Fransiskus, dalam ensiklik *Laudato Si*, art. 95 yang menyatakan bahwa lingkungan alam adalah harta kita bersama, warisan seluruh umat manusia, tanggung jawab semua orang. Karena itu, menurut Mgr. John (Saklil, 2017: 184), sebagai orang Kristen kita harus menjalani tanggung jawab itu menurut teladan Yesus yang mengundang kita untuk merenungkan kebaikan dan keindahan dunia, hidup selaras dengan alam, dan bekerja dengan tangan-Nya hingga menguduskan pekerjaan manusia.

### ***Tinjauan Aspek Hukum dan Perundang-undangan***

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum negara dan seluruh rakyat Indonesia dalam pengaturan dan pemanfaatan sumber daya alam yang pada prinsipnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran seluruh rakyat. Hal itu dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 33:

- Ayat 1: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.”
- Ayat 2: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.”
- Ayat 3: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
- Ayat 4: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.
- Ayat 5: “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.”

Dari UUD 1945 pasal 33 ini, menurut Mgr. John (Saklil, 2017: 185), negara secara tegas melarang adanya penguasaan sumber daya alam di tangan perorangan atau pihak-pihak tertentu. Segala praktik monopoli,

oligopoli, maupun praktik kartel dalam pengelolaan sumber daya alam bertentangan dengan prinsip UUD 1945. Jiwa pasal 33 ini berlandaskan pada semangat sosial, menempatkan penguasaan berbagai sumber daya untuk kepentingan publik (seperi sumber daya alam) pada negara.

Selanjutnya, praktik pengelolaan kekayaan alam demi kesejahteraan rakyat itu dipercayakan kepada pemerintah daerah dengan mengakui dan menghormati hak asal-usul dan adat istiadat desa.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 12 dikatakan:

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disebut dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiski, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah kabupaten.”


Selanjutnya pasal 216 ayat 2 berbunyi: “Peraturan daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib mengakui dan menghormati hak asal-usul dan adat istiadat desa”. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi (Alfons, 2013).

Kemudian, melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Wilayah berbunyi:

“Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal-usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.”

Dengan berbagai peraturan perundang-undangan di atas, masyarakat adat dapat mengambil peran dalam pengelolaan sumber daya alam dalam wilayah adat masing-masing. Karena itu, Mgr. John (Saklil, 2017: 185-186) menegaskan bahwa masyarakat adat harus memberdayakan diri dan tidak lagi memberi peluang untuk diperdaya oleh kepentingan politik kelompok





maupun individu tertentu. Masyarakat adat harus mempunyai kapasitas untuk membangun dirinya sehingga mampu bersaing dalam situasi apa pun. Pemerintah kampung dan pemilik dusun adat harus mengembangkan otoritasnya untuk menguasai kekayaan alamnya.

### ***Tinjauan Aspek Sosial***

Kongres Masyarakat Adat Nusantara merumuskan bahwa masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas wilayah adat yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam dan berbagai kehidupan adat yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam. Berbagai hubungan sosial antaranggota persekutuan masyarakat adat diatur oleh hukum adat yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau organisasi dalam suatu persekutuan adat dengan sumber-sumber alam di wilayahnya. Karena itu, hukum adat dapat dikatakan sebagai pengakuan negara atas hak masyarakat adat untuk menguasai, memiliki, memanfaatkan, dan mengelola sumber daya alam dalam wilayahnya. Hak adat adalah kedaulatan masyarakat adat setempat atas wilayah mereka sendiri (Saklil, 2017: 186).

Mgr. John (Saklil, 2017: 187) menyadari kelemahan masyarakat adat. Antara lain, penentuan batas-batas wilayah yang kurang jelas. Siapa yang menjadi pemegang hak atas suatu wilayah, objek apa saja yang ada di atas tanah tersebut, dan juga jenis hak apa yang melekat pada bidang tanah tersebut. Kondisi seperti inilah yang membuat daya tawar masyarakat adat agak lemah saat menghadapi pihak-pihak tertentu, khususnya pemerintah atau pun pengusaha yang mendapat izin dari pemerintah. Masalah utamanya, pengusaha dan penguasa itu mempunyai uang dan kekuasaan.

### ***Tinjauan Aspek Ekonomi***

Pengakuan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam tidak mungkin dilepaskan dari hak atas lahan dan wilayah adat. Karena itu, Konvensi ILO (*International Labour Organization*) No. 169 menetapkan prinsip dasar bahwa masyarakat adat memiliki hak atas sumber daya alam terkait dengan lahan mereka, termasuk berpartisipasi dalam penggunaan, pengelolaan, dan pelestarian sumber-sumber daya alam di lahan mereka. Pembagian manfaat ini bisa beragam bentuknya, termasuk melalui perjanjian khusus dengan masing-masing masyarakat adat (Saklil, 2017: 187-188).

### ***Tinjauan Aspek Budaya***

Mgr. John (Saklil, 2017: 188-189) menyatakan bahwa kearifan lokal merupakan produk budaya yang patut terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bersifat lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dapat dianggap universal. Kearifan lokal merupakan dasar pengambilan kebijakan pada level lokal di bidang kesehatan, pertanian, pendidikan, pengelolaan sumber daya alam, dan kegiatan masyarakat pedesaan.

Dalam kearifan lokal itu terkandung kearifan masyarakat lokal yang sudah menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya yang diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dipercaya dalam jangka waktu yang lama. Karena itu, Mgr. John menghimbau agar pemerintah memperhatikan kearifan lokal dan mengenal kebiasaan masyarakat atau potensi setempat sebelum melakukan pembangunan.

Mgr. John mengingatkan bahwa dalam melaksanakan pembangunan, diharapkan para pemangku kepentingan mengenal pola pikir masyarakat lokal dan berbagai hal yang ada di daerah yang menjadi sasaran pembangunan. Berbagai pembangunan akan sia-sia jika pemerintah tidak mengenal kebiasaan masyarakat atau potensi yang tepat untuk pembangunan di daerah tersebut.

### ***Tinjauan Aspek Lingkungan Hidup***

Ketersediaan sumber daya alam akan makin terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah maupun kualitasnya apabila alam dieksploitasi secara berlebihan. Mgr. John (Saklil, 2017: 189) menyadari jika berbagai pembangunan yang dilaksanakan secara terus-menerus dengan mengeksploitasi alam, maka akan mengganggu dan menurunkan daya dukung lingkungan.

Melihat kenyataan tersebut, Mgr. John mengingatkan kita bahwa kearifan masyarakat setempat mendapat tantangan dengan harus memenuhi kebutuhan dasar yang semakin besar dan berubahnya pola hidup masyarakat akibat pengaruh budaya luar (adopsi, inovasi teknologi, ekonomi pasar, dan kebijakan politik). Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat lokal.

## Sekilas Pandang Kampung Otakwa

Berikut ini kita akan meninjau secara sekilas saja Kampung Otakwa yang menjadi wilayah kajian artikel ini. Distrik Mimika Timur Jauh adalah salah satu dari 18 (delapan belas) distrik di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Distrik Mimika Timur Jauh memiliki 5 (lima) Kampung yakni Kampung Fanamo, Ohotya (Otakwa), Omawita, Amamapare, dan Ayuka. Kampung Ohotya (Otakwa) berada pada 137° 14' 26" Bujur Timur, dan 4° 59' 37" Lintang Selatan. Kampung Otakwa berjarak kurang lebih 82 (delapan puluh dua) kilometer arah tenggara Kota Timika. Bila menggunakan perahu bermotor, waktu tempuhnya kurang lebih 4 (empat) jam.

Kampung ini terbagi atas tiga dusun yaitu dusun lama, dusun tengah, dan dusun baru. Di sana terdapat satu balai kampung, satu pusat kesehatan yaitu puskesmas pembantu), satu SD YPPK, 7 (tujuh) kios yang menjual sembako milik pengumpul kepiting yang berasal dari luar Papua (Buton, Bugis, dan Makasar), dan satu gedung Gereja Katolik Stasi Santo Lukas Otakwa, serta satu sentra penimbangan ikan milik Koperasi Maria Bintang Laut.

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika (BPS Kabupaten Timika, 2018: 25-30), Distrik Mimika Timur Jauh berpenduduk 3.520 jiwa, terdiri dari 1.834 laki-laki dan 1.686 perempuan. Adapun, penduduk Kampung Otakwa pada 2017 berjumlah 431 orang, terdiri dari 245 laki-laki dan 186 perempuan. Hampir seluruh penduduk Kampung Otakwa adalah Orang Asli Papua (OAP) dan beragama Katolik. Para pendatang antara lain pedagang, guru, dan tenaga medis yang jumlahnya kurang lebih 30 (tiga puluh) orang. Masyarakat Kampung Otakwa memiliki 13 (tiga belas) perahu motor dan 42 (empat puluh dua) perahu tak bermotor baik milik pribadi, kelompok nelayan, pengusaha kios, kampung, atau pun koperasi.

Masyarakat Kampung Otakwa (Ohotya) merupakan Suku Sempan yang dalam sejarahnya hidup secara nomanen, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Suku Sempan hidup tidak jauh ke pedalaman, dari pesisir selatan yang berbatasan langsung dengan Laut Arafuru. Wilayah kampung ini termasuk dalam kawasan konservasi Taman Nasional Lorentz. Kampung Otakwa termasuk salah satu dari kampung-kampung yang terkena dampak tidak langsung limbah tambang PT. Freeport Indonesia.

Mayoritas kaum laki-laki Kampung Otakwa berprofesi sebagai nelayan dan mayoritas kaum perempuan bekerja sebagai pencari *karaka* (kepiting bakau). Hanya beberapa warga saja yang menggarap kebun pisang,

kelapa, atau kebun dengan berbagai jenis tanaman (cabai, tomat, singkong, sayuran) di sela kesibukannya sebagai nelayan atau pencari kepiting.

Kehidupan masyarakat Otakwa diatur dengan hukum adat, baik dalam hubungan sosial maupun tata kelola wilayah dan sumber daya alam. Tujuannya ialah agar masyarakat dapat hidup tenteram, serta sumber daya alam tetap tersedia di hutan maupun sungai serta laut. Mereka bisa kapan pun mengambil sumber daya alam tersebut, jika membutuhkan.

Salah satu aturan adat dalam mencari hasil alam, baik di hutan, sungai, atau pun laut ialah tidak boleh melewati dusun orang lain. Jika hal itu dilanggar, maka bisa memicu konflik hingga terjadi perang antarkelompok. Selain itu, dalam mengelola sumber daya alam, masyarakat Otakwa juga mengenal sistem *sasi*.<sup>2</sup> *Sasi* yang dipasang di dusun sagu, dusun kelapa, kebun atau tempat mencari lainnya bertujuan untuk menjaga sumber daya alam yang ada dalam kawasan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Jika ada warga yang melanggar aturan *sasi*, ia akan didenda oleh para tetua adat (Lestari, 2017: 4-5).

Selain itu, dalam mengelola sumber daya alam masyarakat Otakwa menggunakan sistem *taparu*. *Taparu* berasal dari kata *taparu* (dari bahasa Sempan yang berarti tanah). Jadi *taparu* berarti nama tanah, sehingga arti hurufiahnya ialah “tanah hunian dan sekelompok orang yang menghuni tanah tersebut” (Croenen, 2012: 172).

Ada dua *taparu* besar di Kampung Otakwa, yaitu Matipi dan Waitoko. Masing-masing *taparu* memiliki sub-*taparu*. *Taparu* Matipi memiliki dua sub-*taparu* yaitu Matipi dan Ohotyape, sedangkan *Taparu* Waitoko memiliki 4 (empat) sub-*taparu* yaitu Pihimapi, Mimanapi, Karokapi, dan Tafamapi. Di Kampung Otakwa, pembagian wilayah berdasar pada sub-*taparu*. Dalam sistem pemerintahan kampung, sub-*taparu* dikategorikan sebagai rukun tetangga/RT sehingga kepala sub-*taparu* merupakan ketua RT (Lestari, 2017: 7).

Menurut kisah yang sering diceritakan secara turun-menurun kepada anak-cucu oleh para tetua adat dan orang tua, masyarakat Otakwa berasal dari Okaba, sebuah kampung di timur Otakwa, yang kini termasuk Kabupaten Merauke. Karena terjadi konflik di wilayah tersebut, para leluhur Otakwa memilih pindah ke beberapa tempat dan akhirnya menetap di Kampung Otakwa. Menurut para tetua, perpindahan ke Kampung Ohoyta

---

<sup>2</sup>*Sasi* adalah aturan adat untuk melindungi suatu wilayah dan sumber-sumber daya yang terkandung di dalamnya.

(Otaktwa) terjadi sekitar 1940-an. Di Kampung Otakwa inilah masyarakat menyebut diri sebagai *Semopane Owe* (Orang Sempan). Pada 1950-an, masyarakat Otakwa mulai mengenal Gereja Katolik yang diwartakan oleh Pastor Gerard Zegwaard MSC. Dengan menjadi Katolik, masyarakat Otakwa mulai beralih dari kepercayaan tradisionalnya (Lestari, 2017: 1).

Setelah berpindah ke beberapa tempat karena gangguan keamanan (perang suku, perang perebutan sumber daya alam, dan perang antara Tentara Nasional Indonesia dengan Organisasi Papua Merdeka<sup>3</sup>), masyarakat Otakwa secara permanen kembali ke Kampung Otakwa pada 1982 dan mulai membangun rumah tempat tinggalnya, baik semi permanen maupun permanen, dan membangun kehidupan baru (Lestari, 2017: 1-2).

Menurut Muller (2011: 133) budaya masyarakat Sempan Barat lebih dekat dengan Suku Kamoro. Suku Sempan dan Kamoro adalah satu rumpun namun bahasanya berbeda. Suku Kamoro hidup di pesisir selatan Papua. Wilayah adat mereka kurang-lebih sepanjang 300 kilometer di antara Sungai Otakwa dan Teluk Etna. Masyarakat Distrik Mimika Timur Jauh, Kabupaten Mimika, Desa Manasari (Kampung Fanamo dan Kampung Omawita) dan Kampung Otakwa (Ohotya) sering disebut Sempan Barat.

Suku Sempan berasal dari dua suku kata, *se/he* artinya “tanah” dan *mapone* artinya “tuan”. Jadi, kata *sempan* artinya tuan tanah. Sejak PT. Freeport Indonesia mulai melakukan penambangan di Kabupaten Mimika pada 1967, Suku Sempan dimasukkan dalam Sub-suku Kamoro. PT. Freeport Indonesia hanya mengakui dua suku pemilik hak ulayat Mimika, yaitu Suku Kamoro di pesisir pantai Mimika dan Suku Amungme di pegunungan Mimika. Masyarakat Sempan dikategorikan ke dalam Suku Kamoro (Muller, 2011: 159).

Pastor Julianus Croenen OFM (Croenen, 2012: 170) mengatakan bahwa dusun, sagu, dan anak-anak sungai merupakan milik utama dan sumber kehidupan orang Mimika, baik di pantai maupun di pedalaman. Sumber daya alam Kampung Otakwa melimpah, mulai dari pesisir pantai hingga kaki gunung. Karena itu, mereka mengibaratkan hutan sebagai ‘ibu’ yang harus dijaga agar selalu menyediakan dan memberi kehidupan kepada mereka, kapan pun mereka membutuhkan. Mereka menggantungkan hidup pada kerang, ikan kerapu, ikan kakap, ikan bandeng laut, ikan mulut tikus, dan berbagai jenis ikan lainnya, udang, dan kepiting di sungai, serta dusun sagu dan dusun kelapa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh

---

<sup>3</sup>Pada 1981, masyarakat Otakwa pindah ke daerah Sempan, Kota Timika, namun pada 1982, terjadi konflik antara TNI dan OPM sehingga mereka kembali ke Kampung Otakwa.

sebab itu, semboyan yang terkenal di kalangan Suku Kamoro dan Suku Sempan ialah 3 S (sagu, sampan, dan sungai). Sagu sebagai bahan makanan pokok, sampan sebagai alat transportasi dan mencari makan, serta sungai sebagai tempat mencari makanan selain sagu. Komoditas hasil hutan bukan kayu adalah sarang semut,<sup>4</sup> daun nipah, dan daun pandan laut, gelembung ikan kakap,<sup>5</sup> dan daun pucuk sagu.

Keanekaragaman hayatinya cukup tinggi dan bernilai jual tinggi di Kota Timika. Masyarakat juga menjual hasil tangkapan mereka ke tempat penimbangan ikan di Koperasi Maria Bintang Laut atau pada pengumpul ikan/kepiting di Otakwa.

Posisi Kampung Otakwa yang terletak di pesisir pantai selatan Mimika dan Laut Arafuru menjadi tempat sentral untuk lalu lintas transportasi air melalui sungai atau laut dari beberapa kampung yang berada di Mimika Timur Jauh, Agimuga atau Asmat menuju dan dari Timika sehingga Kampung Otakwa menjadi tempat persinggahan dan belanja berbagai kebutuhan bahan pokok. Hal ini mempercepat perubahan sosial di kampung tersebut. Masyarakat Kampung Otakwa -terlebih anak mudanya- pun mulai terpengaruh oleh modernisasi. Akibatnya, banyak anak muda tidak tertarik lagi mencari ikan atau kepiting. Mereka mau bersenang-senang dan sebagian sering mengonsumsi minuman keras. Selain itu, masyarakat mulai tergantung kepada berbagai bantuan seperti dana kampung atau dana desa,<sup>6</sup> dana respek,<sup>7</sup> serta dana kompensasi PT. Freeport Indonesia.<sup>8</sup> Sebagian besar cenderung menunggu bantuan daripada mengelola dan memanfaatkan hasil alam.

---

<sup>4</sup>Sarang semut adalah tumbuhan yang menempel pada tanaman lain dan dikerumuni semut. Sarang semut dipercaya masyarakat sebagai tanaman obat sehingga mempunyai nilai jual tinggi di Kota Timika.

<sup>5</sup>Gelembung ikan kakap ialah bagian dari organ tubuh ikan berupa selaput yang di dalamnya terdapat gas oksigen. Gelembung ikan kakap ini mempunyai nilai jual tinggi di Kota Timika.

<sup>6</sup>Dana desa/kampung adalah dana pemerintah yang diberikan kepada desa/kampung untuk membangun desa/kampung sesuai kebutuhan dan kearifan lokal.

<sup>7</sup>Dana respek (rencana strategis pembangunan kampung) adalah dana bantuan yang berasal dari dana otonomi khusus Provinsi Papua dan Papua Barat yang disalurkan melalui pemerintahan kampung.

<sup>8</sup>Pemerintah Indonesia dan PT. Freeport Indonesia mengakui hak-hak masyarakat adat Papua di atas wilayah yang digunakan untuk kegiatan pertambangan, dan memperjelas skema bantuan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) Freeport yang sering disebut sebagai dana 1 (satu) persen.

## Program Penguatan Ekonomi di Kampung Otakwa

Sejak 2009 Koperasi Maria Bintang Laut (KMBL) mulai beroperasi di Kampung Otakwa untuk membeli hasil tangkapan ikan masyarakat Otakwa. Dalam pelaksanaannya, sentra penimbangan ikan di Kampung Otakwa mengalami jatuh-bangun. Sentra penimbangan ini pernah ditutup selama beberapa tahun.

Menurut Agus Suyananta, koordinator program ekonomi (pronomi) KMBL, ada beberapa faktor yang menyebabkan ditutupnya sentra perikanan itu, yaitu faktor dana dan fasilitas penunjang operasional yang terbatas, faktor sumber daya manusia yakni keengganan tenaga pendamping profesional untuk secara periodik tinggal di Kampung Otakwa, dan ketidakseriusan masyarakat lokal untuk terlibat di sentra perikanan.

Di lain pihak, banyak warga Otakwa yang belum antusias mencari ikan (karena masyarakat masih bersifat peramu), kekurangan mesin pendingin untuk menyimpan hasil tangkapan supaya tetap segar hingga dikirim ke Timika, kurangnya pendampingan berkelanjutan pada masyarakat nelayan. Dalam hal ini mereka membutuhkan dukungan pihak swasta (PT. Freeport Indonesia) maupun pemerintah daerah.

Suyananta menambahkan, tujuan Koperasi Maria Bintang Laut membuka sentra perikanan di Kampung Otakwa ialah menstabilkan harga ikan supaya hasil tangkapan masyarakat dapat dibeli dengan harga yang wajar sesuai dengan harga pasar di Kota Timika. Para tengkulak ikan umumnya membeli hasil tangkapan masyarakat dengan harga yang murah sekali. Jadi, kehadiran Komisi PSE Keuskupan Timika ialah untuk berbela rasa dengan masyarakat Kampung Otakwa. Hasilnya, masyarakat di Kampung Otakwa yang dulu hanya melakukan barter ikan dengan bahan makanan pokok, sekarang mulai menikmati nilai jual yang wajar.

Pada September 2017, KMBL mulai membuka kembali sentra perikanan di Kampung Otakwa dengan memberikan bantuan berupa sarana tangkap ikan berupa *coolbox*<sup>9</sup> dan jaring. Masing-masing kampung mendapat 50 (lima puluh) paket. Menurut Suyananta, 50 (lima puluh) *coolbox* dan jaring yang dibagikan kepada 20 (dua puluh) kelompok nelayan Kampung Otakwa itu berasal dari bantuan program pronomi PT. Freeport Indonesia.

---

<sup>9</sup>*Coolbox* adalah kotak berpendingin yang digunakan untuk menyimpan daging, ikan, sayur, dan sebagainya.

Selain itu, KMBL juga menjalankan berbagai program pronomi seperti gerakan tabungan untuk nelayan, menjual bahan bakar minyak bersubsidi, membeli hasil-hasil alam seperti sarang semut dan ikan asin, menyediakan mesin pendingin untuk membuat es balok. KMBL juga mengadakan berbagai pelatihan untuk nelayan seperti perbaikan motor tempel, pembuatan perahu fiber, perbaikan jaring, dan pelatihan pembuatan ikan asin. KMBL juga mengajak masyarakat untuk menanam kelapa sebagai investasi masa depan jika hasil tangkapan ikan atau *karaka* (kepiting) semakin berkurang. Hasilnya bisa dijual ke KMBL.

Koperasi Maria Bintang Laut menempatkan seorang tenaga pendamping yang bertempat tinggal di sentra perikanan di Kampung Otakwa. KMBL juga merekrut 2 (dua) tenaga lokal yang sudah mengikuti pelatihan dan pendampingan untuk mendukung pelaksanaan pronomi. Selain itu, KMBL juga melibatkan petugas pastoral yang bertugas di Stasi Gereja Kampung Otakwa, para guru SD YPPK, dan aparat kampung.

Selama periode I pronomi (Juli 2017-31 Agustus 2019), KMBL melakukan identifikasi potensi sektor pertanian dan perkebunan di Otakwa bersama dengan team *Sosial Local Deveplopment* (SLD) PT. Freeport Indonesia, dinas pertanian dan dinas perkebunan pemerintah daerah Kabupaten Mimika.

Tugas tenaga pendamping ini ialah memberi pelatihan dan pendampingan tentang berbagai program pronomi secara berkala. Misalnya, membeli hasil tangkapan ikan dengan harga yang sesuai, mengajak masyarakat untuk mengolah ikan asin dari hasil tangkapan ikan yang tidak bernilai ekonomi, mengajak masyarakat nelayan untuk menabung, dan menjual bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi. Tenaga pendamping tersebut bertugas mensosialisasikan tujuan program ekonomi dan mengajak masyarakat terlibat dalam program ekonomi tersebut.

Suyananta menyatakan bahwa jumlah nelayan peserta program ekonomi di Kampung Otakwa ini bervariasi. Pada September 2017, tercatat 64 nelayan yang menjual ikan di tempat penimbangan di Otakwa, bulan Oktober 2017 ada 20 nelayan, bulan November 2017 sebanyak 40 orang, dan Desember 2017 sebanyak 11 orang. Dari data tersebut terlihat bahwa terjadi penurunan partisipasi nelayan dalam program ekonomi tersebut. Penurunan partisipasi itu terjadi karena sebagian masyarakat tidak dapat menutup kerugian antara pembelian bensin dengan pendapatan yang diperoleh dari penjualan hasil tangkapan mereka. Akibatnya banyak nelayan yang berhutang bahan bakar minyak pada KMBL dan tidak sanggup membayarnya.





Untuk mendukung kelancaran kegiatan pronomi, pada Januari 2018, KMBL menyediakan dua *freezer* berkapasitas 300 kg untuk menampung ikan masyarakat dan sebuah genset 5000 kVA untuk operasional tempat penimbangan ikan Otakwa. *Freezer* ini juga dapat memproduksi es balok yang digunakan nelayan melaut selama dua atau tiga hari. Dengan tersedianya es balok, para nelayan bisa menjaga kesegaran ikan hasil tangkapannya. Selain itu, Robertus Gale, tenaga pendamping sentra perikanan di Kampung Otakwa mengatakan bahwa KMBL juga membuka kios untuk memfasilitasi masyarakat nelayan dalam memenuhi kebutuhan bahan makanan dengan harga yang wajar.

Dalam penjualan bbm kepada masyarakat nelayan di sana terdapat 3 (tiga) kategori harga, yaitu: untuk umum yang bukan masyarakat asli Kampung Otakwa, bbm dijual dengan harga Rp. 15.000,00. Untuk nelayan yang tidak bergabung dalam koperasi harganya Rp. 13.000,00 sedangkan bagi anggota koperasi, bensin dijual dengan harga Rp.11.000,00.

Robertus Gale menjelaskan bahwa alasan utama KMBL mengajak masyarakat membuat ikan asin ialah karena banyak hasil tangkapan (khususnya ikan mulut tikus, ikan bandeng, ikan lasi, dan ikan duri) yang tidak tertampung oleh KMBL atau pun pengumpul ikan yang lain. Dengan membuat ikan asin, masyarakat bisa mendapat penghasilan tambahan. Ikan campuran segar dibeli oleh KMBL hanya Rp. 7.000/kg sedangkan ikan asin dihargai Rp. 25.000/kg.

Dalam gerakan menabung, salah satu strategi KMBL mengajak masyarakat nelayan untuk menabung ialah dengan penjualan bensin. Menurut Suyananta, sebenarnya harga bensin bersubsidi untuk masyarakat nelayan adalah Rp. 11.000,00 akan tetapi KMBL sengaja menjualnya dengan harga Rp. 13.000,00. Dengan demikian, setiap kali nelayan membeli bensin, setiap liternya mereka sudah menabung Rp. 2000,00. Jadi, misalnya mereka membeli bensin sebanyak 50 liter, berarti mereka sudah menabung sebesar  $(50 \times \text{Rp. } 2000,00) = \text{Rp. } 100.000,00$ . Selain itu, KMBL juga mengajak masyarakat untuk menabung hasil penjualan ikan mereka. Ketika menjual ikan di KMBL, mereka hanya mendapat sebagian dari hasil penjualan ikan itu dalam bentuk uang tunai karena sebagiannya lagi dimasukkan dalam tabungan mereka.

Menurut Robertus Bale, masyarakat Otakwa yang mengikuti program tabungan itu terdaftar 20 orang, terdiri dari 16 orang nelayan, 1 orang petani, dan 2 orang petugas pendamping. Kepala Kampung Otakwa, pun menjadi peserta gerakan tabungan pronomi. Jumlah dana yang terkumpul selama tahun 2019 sebanyak Rp. 10.407.000,00.



Robertus Gale menambahkan bahwa antusiasme nelayan untuk mengikuti program tabungan cukup tinggi namun para nelayan masih sering menghabiskan penghasilan yang mereka dapat. Robertus mengatakan bahwa ia akan terus mensosialisasikan gerakan menabung kepada masyarakat nelayan sebagai bagian dari Gerakan Tungku Api Kehidupan.

Di sentra perikanan di Kampung Otakwa, ada dua jenis ikan yang dibeli oleh KMBL, yaitu ikan kakap dibeli dengan harga Rp. 17.000,00/kg, dan ikan campuran (ikan mulut tikus dan ikan bandeng laut) dengan harga Rp. 7.000,00/kg. Menurut Suyananta, perbedaan harga ini terjadi karena permintaan ikan kakap untuk logistik PT. Freeport Indonesia cukup besar (untuk keperluan karyawan perusahaan), sementara jenis ikan lainnya (ikan mulut tikus, ikan bandeng, atau ikan lasi) tidak dibeli oleh PT. Freeport Indonesia. Ikan campuran itu pun tidak begitu laku di Kota Timika. Oleh sebab itu, Suyananta menyarankan para nelayan untuk mengolah ikan itu menjadi ikan asin. Tenaga pendamping KMBL, Robertus Gale pun siap memberi pelatihan pembuatan ikan asin kepada masyarakat nelayan. Masalahnya, pengolahan ikan asin seringkali mengalami kendala cuaca.<sup>10</sup> Misalnya, cuaca yang kurang baik mereka alami selama bulan Juli-September 2019. Saat itu cuaca mendung dan hujan terus-menerus sehingga nelayan tidak bisa menjemur ikan asin.


Nelayan yang aktif menangkap ikan pun fluktuatif; jumlahnya naik-turun. Kadang ada 70 nelayan yang tercatat menjual ikan, namun –misalnya– pada Juni 2019, hanya 17 nelayan. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan masyarakat Kamoro Sempan yang hidup sebagai peramu. Mereka mencari ikan sekedar untuk menambah penghasilan keluarga tetapi bukan sebagai profesi utama.

Sebagai gambaran, pada Februari 2019, KMBL membeli 991 kg ikan campuran dengan harga nominal Rp. 6.937.000,00 dan ikan kakap sebanyak 424 kg, senilai Rp. 7.208.000,00 dari 17 nelayan. Hal ini berarti setiap nelayan mendapatkan penghasilan sebanyak Rp. 832.000,00.<sup>11</sup> Adapun, pada Juni 2019, KMBL menerima 2.400 kg ikan campuran senilai Rp. 16.800.000,00 dan 647 kg ikan kakap senilai Rp 10.999.000,00 yang didapat

---

<sup>10</sup>Untuk pengolahan ikan asin memerlukan cuaca matahari yang terik untuk menjemur ikannya.

<sup>11</sup>Angka tersebut didapat dari total penjualan ikan (Rp. 6.937.000,00 + Rp. 7.208.000,00) dibagi untuk 17 nelayan.



dari 70 nelayan. Hal ini berarti setiap nelayan pada Juni 2019 mendapat penghasilan sebanyak Rp. 397.128,00.<sup>12</sup>

Program ekonomi lainnya ialah penyediaan es balok di Kampung Otakwa karena selama ini es balok dikirim dari Kota Timika dengan ketersediaan yang sangat terbatas. Masalah utamanya ialah akses transportasi dalam pengiriman es tersebut. Maka, pada November 2019 di Kampung Otakwa dibangun pabrik es balok dengan dana CSR PT. Freeport Indonesia. Dengan pembangunan pabrik itu diharapkan masalah es balok dapat diatasi. Suyananta mengatakan, pabrik es balok ini menggunakan tenaga listrik dari *solar cell* (tenaga sinar matahari). Dengan cukup tersedianya es balok, kebutuhan es sebagai sistem pendingin supaya ikan tetap segar sampai di Kota Timika dapat diatasi.

### **Dampak Gerakan Tungku Api Kehidupan**

Untuk mengetahui dampak Gerakan Tungku Api Kehidupan pada masyarakat Kampung Otakwa, apakah sesuai dengan harapan Gereja dan masyarakat dalam meningkatkan taraf kehidupan nelayan, kami berkunjung ke Kampung Otakwa, mewawancarai 15 nelayan serta tenaga pendamping sentra perikanan KMBL di Kampung Otakwa.

### ***Penghasilan Masyarakat***

Dalam wawancara terungkap bahwa hanya sedikit nelayan yang rutin melaut. Dari 15 nelayan, hanya ada dua yang melaut sebanyak 6 hari seminggu. Pada Hari Minggu, umumnya mereka beristirahat. Malah, ada seorang nelayan yang mengatakan bahwa dia melaut hanya seminggu sekali saja, dan ada tiga nelayan yang melaut dua kali seminggu.

Dalam hal kepemilikan perahu sebagai sarana untuk melaut, dari 15 responden, ada 6 nelayan yang tidak mempunyai perahu sendiri. Mereka kemudian menyewa perahu dari orang lain, kerabat, koperasi, atau dari kelompok nelayan. Ketika nelayan itu mendapatkan hasil tangkapan, ia akan berbagi hasil tangkapannya dengan pemilik perahu. Menurut seorang nelayan, biaya sewa mesin tempel *Johnson* bervariasi, antara Rp. 100.000,00 hingga Rp. 200.000,00 per malam.

---

<sup>12</sup>Angka tersebut didapat dari total penjualan ikan (Rp. 16.800.000,00 + Rp 10.999.000,00) dibagi untuk 70 nelayan.

Tentang kepemilikan mesin tempel (*Johnson*),<sup>13</sup> hanya ada 3 nelayan yang mempunyai mesin tempel sendiri, selebihnya, 12 nelayan tidak mempunyai mesin tersebut. Sembilan nelayan meminjam dari kelompok nelayan, keluarga, pengusaha, atau sentra perikanan KMBL. Karena tidak memiliki modal, ada 3 nelayan yang menggunakan perahu dayung untuk menangkap ikan sehingga jangkauan untuk menangkap ikan itu dekat sekali; tergantung kemampuan nelayan tersebut mendayung perahu. Hasil tangkapan ikannya pun hanya sedikit.

Dalam hal kepemilikan jaring, hampir seluruh (15, lima belas) nelayan yang diwawancarai mempunyai jaring sendiri, bahkan ada seorang nelayan yang mempunyai 27 jaring, ada dua nelayan yang mempunyai 15 jaring, dan ada yang memiliki 6 jaring. Hanya satu nelayan yang menyewa jaring dari orang lain. Jumlah jaring yang digunakan tentu sangat memengaruhi jumlah ikan yang didapatkan. Semakin banyak jaring yang digunakan, maka semakin banyak ikan yang akan didapatkan.

Dalam memperbaiki jaring yang rusak, 9 nelayan mengatakan bahwa mereka bisa memperbaiki jaring yang rusak, sementara 6 nelayan mengatakan bahwa mereka tidak bisa memperbaiki sendiri. Alasannya, mereka belum mendapat pelatihan dari tenaga pendamping KMBL. Selain itu, mereka tidak mempunyai alat-alat untuk memperbaiki jaring seperti *coban*,<sup>14</sup> *seleran*,<sup>15</sup> dan benang jaring. Di Kampung Otakwa tidak tersedia berbagai peralatan tersebut. Untuk membeli berbagai peralatan tersebut mereka memerlukan ongkos transportasi ke Kota Timika. Mereka berharap pihak KMBL bisa menyediakan peralatan tersebut.


Penghasilan nelayan di Kampung Otakwa yang ada dalam lingkup program Gerakan Tungku Api Kehidupan ini bervariasi. Ada satu nelayan yang hanya membawa pulang uang sebesar Rp. 20.000,00. Seorang nelayan lain misalnya, hanya mendapat 5 kg ikan kakap dan 15 kg ikan campuran dalam semalam. Setelah dipotong utang bahan bakar Rp. 130.000,00 dan utang bahan makanan (rokok, kopi, gula, baterai, beras), pendapatan yang ia bawa pulang sebesar Rp. 100.000,00. Selain itu, ada 3 nelayan yang

---

<sup>13</sup>Motor tempel adalah mesin penggerak perahu yang ditempelkan pada buritan. Para nelayan Otakwa sering menyebutnya *Johnson karena* itulah merk motor tempel yang paling lazim mereka pakai.

<sup>14</sup>Coban merupakan alat yang terbuat dari plastik atau bambu yang berfungsi untuk menyulam jaring.

<sup>15</sup>Seleran merupakan alat yang terbuat dari kayu atau bambu yang berfungsi sebagai penentu ukuran mata jaring.



menceritakan bahwa mereka mendapat penghasilan bersih di bawah Rp. 100.000,00 ada 6 nelayan yang mendapatkan penghasilan di antara Rp. 200.000,00 hingga Rp. 300.000,00 dan hanya 1 nelayan yang mampu mendapatkan penghasilan bersih sebesar Rp. 325.000,00. Namun, ada juga nelayan yang memperoleh pendapatan cukup besar. Fabianus, misalnya, pernah mendapatkan ikan kakap (30 kg) dan ikan campuran (70 kg). Hasil bersih yang ia dapatkan hari itu Rp. 740.000,00. Hasil yang didapatkan biasa ia digunakan untuk membeli keperluan rumah tangga seperti beras, gula, kopi, supermie, uang jajan anak sekolah, dan lain-lainnya.

### ***Gerakan Menabung***

Dalam gerakan menabung, para nelayan Otakwa (15 responden) mengatakan bahwa program tabungan Gerakan Tungku Api Kehidupan (pronomi) sangat bermanfaat bagi mereka. Mereka mengatakan, dengan menabung mereka bisa menyekolahkan anak-anak, bisa menjamin masa depan, dan bila kekurangan bahan makanan di rumah bisa meminjam di koperasi.

Dari 15 nelayan yang diwawancarai, 7 nelayan telah menjadi anggota gerakan menabung dan menyatakan bahwa tabungan itu sangat bermanfaat bagi mereka. Namun, masih lebih banyak (8 nelayan) yang belum menjadi anggota. Ada yang mengatakan bahwa ia belum mendapatkan sosialisasi tentang gerakan menabung ini.

Untuk perbaikan kehidupan nelayan, mereka mengusulkan agar Koperasi Maria Bintang Laut menaikkan harga beli ikan campuran yang sekarang hanya Rp.7.000,00/kg. Para nelayan itu juga meminta agar KMBL menyediakan jaring, motor temple, maupun perahu sebagai sarana untuk melaut. Selain itu, para nelayan mengusulkan untuk mengadakan pelatihan perbaikan jaring, motor tempel, maupun gerakan tabungan secara berkala dan berkesinambungan.

Ada dua masalah yang diungkapkan oleh para nelayan mengenai ancaman dalam mencari ikan, yaitu kehadiran kapal nelayan para pendatang (Suku Bugis, Buton, Makasar). Mereka menggunakan berbagai peralatan modern sehingga para nelayan tradisional sulit bersaing dalam mencari ikan. Selain itu, sampai sekarang ini masih terjadi konflik perebutan batas wilayah pencarian ikan dan kepiting dengan kampung tetangga (Kampung Fanamo).

## Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman yang Dihadapi Nelayan Kampung Otakwa

Dalam menganalisis berbagai persoalan masyarakat Kamoro Sempan dalam merealisasikan program ekonomi Gerakan Tungku Api Kehidupan di Kampung Otakwa, kami melakukan analisis SWOT terhadap data penelitian lapangan, serta laporan-laporan Koperasi Maria Bintang Laut (2017, 2018, 2019) dan PT. Freeport Indonesia (2018).

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek atau spekulasi bisnis. Dari hasil analisis SWOT ini, kami akan merumuskan suatu perencanaan pastoral yang akan dituangkan dalam rancangan pastoral sosial-ekonomi yang mendukung Gerakan Tungku Api Kehidupan. Perencanaan pastoral sosial ekonomi ini dimaksudkan sebagai program pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan visi dan misi pastoral sosial-ekonomi keuskupan Timika.

Dalam penjabaran analisis SWOT ini, kami akan menjabarkannya menjadi 2 (dua) bagian. Pertama, kami akan melihat berbagai faktor yang merupakan kekuatan dan peluang program Gerakan Tungku Api Kehidupan dalam kehidupan masyarakat Kampung Otakwa. Kedua, kami akan menganalisis faktor-faktor penghambat yakni faktor-faktor yang merupakan suatu kelemahan warga kampung sendiri dan ancaman dari luar bagi berhasilnya program ekonomi tersebut.

### *Faktor Pendukung*

Dalam analisis SWOT ini, yang dimaksud dengan faktor-faktor pendukung dalam menjalankan Gerakan Tungku Api di Kampung Otakwa ini ialah kekuatan (faktor internal) yang ada dalam masyarakat Kampung Otakwa sendiri dan peluang (faktor eksternal) yang ada di lingkungan sekitar mereka, baik potensi alam atau pun dukungan pihak luar.

Faktor-faktor yang merupakan kekuatan masyarakat Kampung Otakwa sendiri, antara lain:

- Hampir 100% masyarakat Kampung Otakwa beragama Katolik dan Gereja Katolik hadir di tengah masyarakat. Stasi Santo Lukas Kampung Otakwa berada dalam reksa pastoral Paroki Emanunel Mapurujaya Timika. Dewan stasi dan pengurus gereja terlibat aktif dan mendukung kegiatan program pronomi sehingga Gereja Katolik Keuskupan Timika

melalui Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi lebih mudah masuk ke dalam pelayanan sosial ekonomi. Selain itu, aparat kampung juga terlibat aktif dalam Gerakan Tungku Api Kehidupan dan mendukung kegiatan tersebut.

- Salah satu keunggulan masyarakat Otakwa dalam adat istiadat adalah mereka masih menjunjung tinggi nilai kearifan lokal dalam hal mencari sumber daya alam. Mereka berpijak kepada budaya *taparu* dan *sasi* serta taat kepada aturan adat istiadat Suku Kamoro Sempan.
- Penduduk Kampung Otakwa hampir 80% menjadi nelayan, dan masih erat dengan budaya 3 S (Sungai, Sampan, dan Sagu). Selain sumber daya alam laut, terdapat juga hasil kebun seperti pisang atau kelapa yang mempunyai nilai jual. Jumlah perahu yang dimiliki oleh masyarakat sebanyak 13 (tiga belas) perahu motor dan 42 (empat puluh dua) perahu tak bermotor.

Adapun sejumlah faktor pendukung eksternal, yakni peluang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kampung Otakwa antara lain:

- Sumber daya alam laut dan pesisir yang sangat melimpah (ikan, kepiting, kerang, dan sebagainya) yang menjadi sumber pangan dan penghasilan ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh posisi Kampung Otakwa terletak persis di pesisir Laut Arafuru. Posisi kampung juga menjadi tempat yang sentral untuk jalur transportasi laut melalui sungai maupun laut dan tempat persinggahan, masyarakat dari kampung Distrik Mimika Timur Jauh, Agimuga, dan Kabupaten Asmat dalam perjalanan menuju dan kembali dari Timika untuk berbagai keperluan.
- Selain itu, kampung ini termasuk dalam salah satu kampung yang masuk dalam program CSR PT. Freeport Indonesia (lih. Setiawan, 2018; Hendriques, 2019). Melalui program kemitraan, Keuskupan Timika melalui Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE), Koperasi Maria Bintang Laut sudah hadir di sana sejak tahun 2009 untuk membeli ikan. Sentra penimbangan ikan milik KMBL mulai beroperasi kembali di Kampung Otakwa dengan menjual bahan bakar minyak bersubsidi. Selain itu, KMBL juga mempunyai seorang tenaga pendamping yang tinggal menetap di Kampung Otakwa dan dibantu oleh dua tenaga lokal. KMBL juga membuka kios untuk menyediakan berbagai kebutuhan nelayan. Pada bulan November 2019, pabrik es dibuka di Kampung Otakwa sehingga berbagai kesulitan dalam pengadaan es balok dapat teratasi.

- Terlihat bahwa pemerintah daerah (pemda) Kabupaten Mimika terlibat dalam pembangunan di kampung. Instansi dinas perikanan, perkebunan dan kehutanan terlibat aktif dan bermitra dalam program pronomi.
- Terdapat tenaga guru SD YPPK yang tinggal di Kampung Otakwa serta tenaga kesehatan yang menetap untuk melayani kesehatan masyarakat. Dalam menggerakkan perekonomian kampung, sejumlah pengusaha kios menyediakan berbagai kebutuhan sembilan bahan pokok dan pengumpul kepiting yang membeli *karaka*/kepiting dari masyarakat.
- Karena posisi Kampung Otakwa menjadi sentral dari transportasi laut menuju dan dari Timika, sejumlah masyarakat dari berbagai kampung menjadikan Kampung Otakwa sebagai tempat persinggahan. Selama mereka singgah, mereka juga membeli berbagai kebutuhan di sana.

### ***Faktor Penghambat***

Yang dimaksud dengan faktor penghambat Gerakan Tungku Api Kehidupan ialah kelemahan-kelemahan (*weakness*) dalam masyarakat Kampung Otakwa dan ancaman (*threats*) yang ada di lingkungan mereka, entah lingkungan alam atau pun sosial.

Faktor-faktor yang tampak sebagai kelemahan masyarakat, antara lain:

- Pola hidup masyarakat Kampung Otakwa masih bersifat peramu. Masyarakat bersifat konsumtif, hidup hari untuk hari ini. Segala sesuatu yang dihasilkan atau didapatkan hari ini dimanfaatkan langsung untuk hari tersebut (Saklil, 1996: 39). Mereka tidak mempunyai kebiasaan dalam perencanaan untuk menabung atau menyimpan sesuatu untuk hari esok. Dalam kehidupan peramu, ikatan komunal (kekerabatan kekeluargaan) itu sangat kental sekali jika seseorang mendapatkan hasil sesuatu seperti ikan, dia akan langsung membagikan seluruh hasil tangkapan kepada kekerabatnya yang terdekat. Secara prinsip ekonomi, prinsip komunal ini tidak sesuai dengan semangat asas ekonomi.
- Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, sifat kecemburuan sosial dan iri hati muncul di antara masyarakat. Jika ada salah satu anggota masyarakat yang lebih maju atau berkembang, anggota masyarakat yang lain akan berusaha untuk menghambat kesuksesan yang diraih oleh anggota masyarakat tersebut.
- Salah satu kelemahan lain ialah sumber daya manusia Kampung Otakwa yang bertingkat pendidikan rendah. Sejak dari kecil, anak-anak yang



masih usia sekolah, mereka dibawa oleh orang tua pergi melaut atau mencari kepiting sehari-hari. Banyak masyarakat yang hanya mengenyam pendidikan sekolah dasar atau tidak bisa membaca tulis (buta huruf).

- Salah satu keluhan dari masyarakat nelayan adalah sulit akses pemasaran untuk menjual hasil tangkapan ikan dengan harga yang wajar. Karena selama ini, masyarakat menjual hasil tangkapan ke tengkulak dengan harga yang murah.

Adapun, faktor-faktor yang seringkali menghambat atau menjadi ancaman dalam pengembangan Gerakan Tungku Api Kehidupan ialah:

- Akses transportasi laut menuju dan ke Timika melalui jalur sungai terhambat dengan sedimentasi dan pencemaran limbah tailing PT. Freeport Indonesia yang mengakibatkan harga sembilan bahan pokok (sembako) menjadi mahal. Selain itu, ancaman dari faktor keamanan karena terjadi perebutan lahan wilayah pencarian dengan kampung tetangga (Kampung Fanamo), maka kadang terjadi perselisihan dengan kampung tetangga.
- Masyarakat Kampung Otakwa, khususnya anak mudanya mulai terpengaruh dengan budaya hedonisme<sup>16</sup> dan modernisasi dalam kehidupan sehari-hari sehingga anak muda tidak begitu tertarik untuk pergi melaut atau mencari kepiting. Mereka hanya mau senang-senang saja dengan mabuk-mabukan karena terpengaruh minuman keras.
- Ancaman yang lain adalah kehadiran kapal nelayan dengan fasilitas yang modern untuk mencari ikan di sekitar Laut Arafuru. Para nelayan tersebut merupakan para pendatang yang berasal dari Suku Bugis, Buton, Jawa, dan Makasar. Hal ini mengakibatkan nelayan asli Papua sulit bersaing dengan para nelayan pendatang dalam mencari ikan. Selain itu, persediaan ikan menjadi berkurang yang disebabkan oleh para nelayan pendatang dengan berbagai peralatan modern.
- Dalam kehidupan sehari-hari, pola makan masyarakat Kampung Otakwa mulai berubah dari sagu ke beras. Masyarakat jarang memanggul sagu di dusun sagu lagi, mereka lebih condong untuk membeli beras dan berbagai kebutuhannya di kios.

---

<sup>16</sup>Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan, merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia.

- Beberapa tahun terakhir ini, masyarakat mulai hidup tergantung pada bantuan dari dana kampung/desa, dana respect, dan dana kompensasi satu persen PT. Freeport Indonesia. Berbagai bantuan dari pemerintah atau pun pihak swasta (PT. Freeport Indonesia) ini membuat masyarakat sekarang ini, di Kampung Otakwa hanya menunggu bantuan untuk keperluan hidup daripada pergi mencari ikan atau kepiting. Hal ini membuat masyarakat bermental “tadah tangan”, yakni kebiasaan mendapatkan uang dari pemberian orang, tanpa mengeluarkan keringat.


Secara singkat analisis tentang kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi masyarakat Otakwa tersebut kami ringkaskan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 1.**  
**Analisis SWOT Gerakan Tungku Api Kehidupan**  
**di Kampung Otakwa**

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Strengths (Kekuatan)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekitar 80% masyarakat berprofesi sebagai nelayan dan masih erat dengan budaya 3S (sungai, sampan, dan sagu).</li> <li>2. Masyarakat hampir seluruhnya beragama Katolik dan Gereja Katolik terlibat aktif dalam pelayanan di sana.</li> <li>3. Ketertarikan nelayan untuk mengikuti gerakan tabungan pronomi tinggi.</li> <li>4. Masyarakat masih menjunjung kearifan lokal dalam mencari ikan. Dalam hal ini ada sistem pengelolaan sumber daya alam dengan budaya <i>taparu</i> dan <i>sasi</i>.</li> <li>5. Ada dukungan aparat kampung dalam kegiatan pronomi.</li> <li>6. Para nelayan telah memiliki 13 perahu motor dan 42 perahu tak bermotor.</li> <li>7. Selain memiliki hasil sumber daya laut, masyarakat juga telah mengusahakan hasil kebun, antara lain pisang dan kelapa.</li> </ol> | <p><b>Weaknesses (Kelemahan)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat Kampung Otakwa bersifat peramu: apa yang didapatkan hari ini cenderung dihabiskan hari ini.</li> <li>2. Kebanyakan nelayan tidak bersekolah (buta huruf) dan berpendidikan rendah.</li> <li>3. Tidak semua nelayan mempunyai perahu atau motor tempel.</li> <li>4. Sebagian nelayan yang tidak bisa memperbaiki jaring yang rusak.</li> <li>5. Tingkat partisipasi nelayan untuk mengikuti gerakan tabungan masih rendah.</li> <li>6. Masyarakat belum mempunyai biasa untuk menabung (menyimpan uang).</li> <li>7. Sifat komunal dalam hidup bersama: jika seseorang mendapatkan hasil, dia akan berbagi hasil tangkapan dengan kekerabat yang terdekat.</li> <li>8. Ada sifat iri hati dan kecemburuan sosial, jika ada seseorang yang maju dan ada yang merusak.</li> <li>9. Pemasaran ikan hasil tangkap masih terbatas dan harga ikan murah.</li> </ol> |
| <p><b>Oppurnities (Kesempatan)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posisi Kampung Otakwa yang terletak</li> </ol>   | <p><b>Threats (Ancaman)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akses transportasi laut ke Kota Timika</li> </ol>  |

|  |   |
|--|---|
| <p>di pesisir Laut Arafuru, memiliki sumber daya alam laut dan pesisir yang melimpah (ikan, kerang, kepiting).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Posisi kampung merupakan pusat lalu lintas transportasi laut dari beberapa kampung di Mimika Timur Jauh dan tempat persinggahan masyarakat dari Asmat atau kampung lain di Mimika Timur Jauh ketika menuju Timika.</li> <li>3. Kampung Otakwa mendapatkan bantuan CSR dari PT. Freeport Indonesia.</li> <li>4. Kampung Otakwa termasuk sasaran program pronomi. Masyarakat mendapatkan berbagai pelatihan dari program ekonomi tersebut.</li> <li>5. Komisi PSE Keuskupan Timika, Koperasi Maria Bintang Laut telah hadir sejak tahun 2009.</li> <li>6. Sentra perikanan dibuka kembali dengan satu tenaga pendamping dan dua tenaga lokal.</li> <li>7. Ada kios KMBL dan pabrik es di sentra penimbangan ikan (perikanan).</li> <li>8. Adanya dukungan pemerintah daerah dalam pembangunan kampung.</li> <li>9. Puskesmas pembantu, perawat, dan guru SD ada di Otakwa.</li> <li>10. Terdapat sejumlah pengusaha kios dan pengumpul kepiting.</li> <li>11. Otakwa adalah tempat transit transportasi dari dan ke berbagai kampung, seperti Mimika Timur Jauh, Agimuga, dan Asmat.</li> </ol> | <p>terhambat sedimentasi <i>tailing</i> pertambangan PT. Freeport Indonesia sehingga harga sembako menjadi tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Perebutan wilayah pencarian dengan masyarakat kampung tetangga (Fanamo).</li> <li>3. Arus hedonisme sudah memasuki Kampung Otakwa, antara lain kebiasaan minum minuman keras (mabuk-mabukan).</li> <li>4. Karena pengaruh modernisasi, banyak anak muda malas melaut.</li> <li>5. Pola makanan masyarakat sudah berubah dari sagu ke beras sehingga kadang masyarakat kesulitan mencari makan jika kekurangan beras.</li> <li>6. Masyarakat mulai tergantung pada bantuan pihak luar, seperti Dana Kampung, Dana Respect, Dana Kompensasi Satu Persen PT. Freeport.</li> <li>7. Kehadiran kapal nelayan kaum pendatang dengan peralatan modern yang menangkap ikan di perairan Arafuru.</li> </ol> |
|--|---|

Dalam pelaksanaannya kami melihat bahwa Gerakan Tungku Api Kehidupan di Kampung Otakwa ini seolah masih berjalan di tempat; belum menyentuh kehidupan masyarakat Kamoro Sempan. Pronomi (program pengembangan ekonomi) masih sebatas program yang harus dijalankan tanpa memperhatikan secara lebih mendalam situasi dan kondisi masyarakat setempat. Terlihat bahwa dalam program CSR tersebut, PT. Freeport Indonesia melalui team *Sosial Local Development* (SLD) seolah sekedar memenuhi kewajiban dan tanggung jawab saja untuk membantu masyarakat




yang terkena dampak sedimentasi atas pencemaran limbah tailing pertambangan PT. Freeport Indonesia di kawasan pesisir pantai Mimika dan daerah aliran sungai di Kabupaten Mimika. Pendekatan-pendekatan sosio-budaya terhadap masyarakat Kamoro-Sempan kurang mendapatkan perhatian. Tenaga pendamping yang disediakan oleh Koperasi Maria Bintang Laut (KMBL) terlihat belum begitu memahami adat-istiadat dan budaya Kamoro-Sempan, dan masih menggunakan konsep ekonomi modern yang kadang berbenturan dengan budaya dan kebiasaan masyarakat.

Salah satu budaya Kamoro Sempan adalah peramu. Terlihat di Kampung Otakwa bahwa terjadi lompatan peradaban dari pola hidup masyarakat peramu ke peradaban modern atau industrialisasi di mana untuk bisa berhasil maka orang harus berkompetisi. Dalam hal itu, tampak bahwa sebagian masyarakat Kamoro-Sempan belum cukup siap. Program pengembangan ekonomi yang dihadirkan menawarkan pemberdayaan masyarakat dalam bingkai sistem sosial yang baru bagi masyarakat. Program pemberdayaan tersebut kadang berbenturan dengan pola hidup peramu yang masih bergantung pada kemurahan alam. Penyesuaian pola hidup dan cara pandang masyarakat ini membutuhkan proses pendampingan yang intensif dalam berjangka panjang.

Kami melihat bahwa program pemberdayaan yang dihadirkan PT. Freeport Indonesia dengan dukungan Keuskupan Timika dan pemerintah daerah adalah kesempatan bagi masyarakat Kampung Otakwa untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi mereka. Walau demikian, pronomi belum menyentuh kearifan lokal masyarakat Kampung Otakwa. Karena itu, dalam Gerakan Tungku Api Kehidupan kita perlu memerhatikan segi sosio-antropologi masyarakat Kamoro. Misalnya, kami melihat bahwa potensi hasil laut sangat melimpah di Kampung Otakwa, namun kadang kala, hasil tangkapan ikan masyarakat menjadi mubazir karena tidak seluruhnya diterima oleh KMBL maupun para pedagang pengumpul. KMBL hanya menerima ikan kakap, ikan mulut tikus, dan ikan bandeng saja. Hasil tangkapan lainnya seperti ikan lasi, ikan hiu, ikan air tawar, dan ikan bulanak kemudian dikonsumsi sendiri para nelayan. Akibatnya, bila hasil tangkapan mereka terlalu banyak, ikan-ikan itu pun terbuang sia-sia karena busuk. Kreativitas untuk mengolah hasil laut yang tidak diserap pasar inilah yang perlu didorong dan dikembangkan.

Gerakan Tungku Api Kehidupan yang disiapkan untuk masyarakat nelayan, baik istri dan anak-anaknya (para remaja dan anak muda yang putus sekolah) adalah pelatihan pengolahan ikan asin dengan teknik baru. Dengan membuat program pelatihan pengolahan ikan asin ini, diharapkan nantinya masyarakat Kampung Otakwa dapat melepaskan diri dari ketergantungan





pada bantuan pihak lain, bisa mandiri dalam mengelola sumber daya alam tanpa kehilangan akar budaya mereka.

Di lain pihak, kami merasa perlu juga melakukan pemetaan partisipatif bagi pengurus Gereja, Orang Muda Katolik, para tetua adat maupun aparat kampung. Tujuan pemetaan partisipatif ini ialah agar mereka mampu melindungi sumber daya alam demi menjaga keberlangsungan hidup masyarakat lokal (Tekege, 2018).

## Kesimpulan

Gerakan Tungku Api Kehidupan yang dipelopori almarhum Mgr. John Philip Saklil pada 2017 ini, merupakan warisan tak ternilai bagi Keuskupan Timika dan Gereja Katolik Indonesia, dalam upaya perlindungan dan pengelolaan sumber daya masyarakat lokal. Dalam Gerakan Tungku Api Kehidupan, Mgr. John selalu berpesan kepada umat Keuskupan Timika, khususnya masyarakat asli yang masih mempunyai tanah atau dusun, “Jangan hidup dari hasil jual tanah dan dusun tetapi hiduplah dari hasil mengolah tanah dan dusun.” Pesan khusus Mgr. John ini merupakan tanda keberpihakan dan solidaritas Gereja kepada masyarakat lokal yang semakin tersingkir oleh arus globalisasi dan modernisasi dalam aneka wujudnya, seperti urbanisasi, transmigrasi, dan industrialisasi.

Di Keuskupan Timika, pelaksana program pemberdayaan masyarakat adalah Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE). Sejak 2017, Komisi PSE menjalankan pastoral sosial ekonomi baru dalam Gerakan Tungku Api Kehidupan. Koperasi Maria Bintang Laut yang dibentuk oleh Komisi PSE Keuskupan Timika bertugas menjalankan program pemberdayaan masyarakat (Gerakan Tungku Api Kehidupan).

Gereja Katolik Keuskupan Timika menyadari bahwa ada kondisi yang cukup memprihatinkan yang dihadapi masyarakat pesisir Mimika yang di satu sisi memiliki potensi perikanan dan perkebunan yang melimpah tetapi di sisi lain mereka masih bergelut dengan kemiskinan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan bentuk keprihatinan dan bela rasa terhadap masalah masyarakat Kamoro-Sempan ini yang *nota bene* mayoritas beragama Katolik. Komisi PSE Keuskupan Timika melalui Koperasi Maria Bintang Laut menjalin kemitraan dengan berbagai pihak khususnya PT. Freeport Indonesia yang melalui program CSR-nya, peduli pada pemberdayaan masyarakat pesisir.

Latar belakang ekonomi masyarakat Kamoro Sempan adalah peramu. Masyarakat bersifat konsumtif, segala sesuatu yang didapat hari ini

dihabiskan hari ini. Mereka sangat tergantung pada alam. Sumber daya alam Kampung Otakwa sangat melimpah dengan berbagai sumber daya alam, seperti ikan, kepiting, kerang, dan lainnya. Hasil-hasil alam itu bernilai jual tinggi di Kota Timika. Namun karena minimnya akses transportasi ke Timika, masyarakat mengalami kesulitan memasarkan hasil alam mereka ke Timika. Demikian pun harga sembilan bahan pokok yang harus didatangkan dari Kota Timika pun menjadi mahal.

Komisi PSE Keuskupan Timika melalui Koperasi Maria Bintang Laut memberdayakan umat di komunitas nelayan di Kampung Otakwa dengan membuka kembali sentra perikanan -yang dikenal sebagai tempat penimbangan ikan- dengan membeli hasil tangkapan nelayan, membuka kios, dan menggalakkan gerakan menabung. Selain program-program itu, KMBL juga mengadakan berbagai pelatihan untuk memperbaiki jaring, membuat ikan asin, dan pelatihan pemetaan partisipatif.

Masyarakat juga antusias dengan gerakan menabung yang dirasa sangat bermanfaat bagi mereka. Namun, sosialisasi gerakan menabung dan pendekatan pada masyarakat tampaknya masih kurang intensif dan perlu waktu serta proses berkesinambungan. Dalam gerakan menabung ini, kiranya KMBL bisa melibatkan Credit Union (CU) Bintang Laut dalam simpan-pinjam keuangan.

Dalam seluruh upaya pemberdayaan masyarakat, kiranya KMBL dan PT. Freeport Indonesia perlu memerhatikan aspek antropologis dan sosiologis masyarakat setempat. Masyarakat Kamoro-Sempan mengalami lompatan dari masyarakat peramu ke peradaban modern. Masyarakat Kamoro-Sempan membutuhkan pendampingan untuk menghadapi perubahan zaman. Dalam hal ini, Komisi PSE Keuskupan Timika perlu melibatkan lebih banyak masyarakat lokal supaya suatu saat nanti masyarakat lokal bisa mandiri dalam mengelola dan melindungi sumber daya alamnya.



### Daftar Rujukan

Alfons, Saartje S. 2013. "Eksistensi Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Menuju Otonomi Desa di Maluku". URL: <https://fhukum.unpatti.ac.id/pemerintahan-dan-hukum-adat/283-eksistensi-hak-hak-masyarakat-adat-dalam-pengelolaan->

sumber-daya-alam-menuju-otonomi-desa-di-maluku. Diunggah pada 12 Juli 2013 dan diunduh pada 14 Februari 2020, 10.00 WIT.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Timika. 2018. *Distrik Mimika Timur Jauh dalam Angka 2018*. Timika: BPS.

Croenen, Jualanus. 2012. *Kamoro Aspek-Aspek Kebudayaan Asli*. Yogyakarta: Kanisius.

Freeport Indonesia, PT. 2018. *Laporan Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Program Ekonomi Suku Kamoro di 8 (delapan) kampung binaan periode Juli 2017 – Juli 2018 – Program Kemitraan PT. Freeport Indonesia – Keuskupan Timika*. Timika: PT. Freeport Indonesia

\_\_\_\_\_. 2020. “Profil PT. Freeport Indonesia: Kemitraan LPMK.” dalam <http://ptfi.co.id/id/lpmak-partnership>. Diunduh pada 13 Februari 2020. 21.00 WIT.

Hendriques, Lambertus Sebastianus Carlos. 2019. *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility oleh PT. Freeport Indonesia seperti Diamanatkan Kepmen ESDM (skripsi)*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.

Keuskupan Timika. 2017. *Arab Dasar Gerakan Melindungi dan Mengelola Sumber Hak Hidup Ekonomi Masyarakat Lokal*. Arahan umum Mgr. John Philip Saklil dalam Rapat Dewan Pimpinan Keuskupan Timika.

\_\_\_\_\_. 2018. *Direktori Keuskupan Timika 2018*. Timika: Kantor Sekretariat Keuskupan Timika.

Komisi PSE KWI. 2018. *Arab Dasar Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) 2018-2022; Melindungi dan Mengelola Sumber Hak Hidup Ekonomi Masyarakat Lokal*. Jakarta: Komisi PSE KWI.

Koperasi Maria Bintang Laut. 2017. *Profil Lembaga dan Kegiatan. 2017. Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Kamoro di Wilayah Pesisir Pantai Mimika*. Timika: Koperasi Maria Bintang Laut.

\_\_\_\_\_. 2018. *Laporan Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Program Ekonomi Masyarakat Suku Kamoro di 5 (lima) Daskam (daerah aliran sungai kampung), Manasari, dan Otakwa periode Juli 2017– Juni 2018*. Timika: Koperasi Maria Bintang Laut.

\_\_\_\_\_. 2019. *Laporan Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Program Ekonomi Masyarakat Suku Kamoro di 5 (lima) daskam (daerah aliran sungai kampung), Manasari, dan Otakwa periode Juni 2018–Agustus 2019*. Timika: Koperasi Maria Bintang Laut.

- Lestari, USAID. 2017. *Profil Masyarakat Adat Sempan – Mimika Kampung Obotya*. Timika: USAID Lestari.
- Loke, Eddy. 2019, “Menyiapkan Jalan bagi PSE yang Lebih Baik dan Bermanfaat,” dalam *Sadhana*. Edisi 277.
- Muller, Karl. 2011. *Pesisir Selatan Papua*. Timika: LPMMAK.
- Nota Pastoral KWI. 2013. *Keterlibatan Gereja dalam Melestarikan Kentuban Ciptaan*. Jakarta: KWI.
- O’Collins, Gerard. 1996. *Kamus Teologi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Saklil, John Philip. 1996. *Menuju Gereja Peramu: Suatu Refleksi Anthropologis-Eklesiologis Terhadap Kebudayaan Mimika*. Karya Tulis Ilmiah. Jayapura: STFT Fajar Timur.
- \_\_\_\_\_. 2017. “Biarkan Tungku Api Tetap Menyala: Gerakan Melindungi dan Mengelola Sumber Hak Hidup Ekonomi Masyarakat Adat Papua,” dalam Izak Resubun dkk (penyunting), *Pendidikan dan Realitas Sosial di Papua*, Jayapura: Biro Penelitian STFT Fajar Timur.
- \_\_\_\_\_. 2018. “Melindungi dan Mengelola Sumber Hak Hidup Ekonomi Masyarakat Lokal,” dalam *Sadhana*. Edisi 270.
- Setiawan, Sakina Rahma Diah (ed). 2018. “Lakukan CSR, Freeport Fokus di Empat Bidang ini.” URL: <http://ekonomi.kompas.com/read/230421426/lakukan-csr-freeport-fokus-di-empat-bidang-ini>. Diunggah pada 18 Oktober 2018 dan diunduh pada 13 Februari 2020, 21.40 WIT.
- Tekege, Yuven. 2018. “Pelatihan Pemetaan Partisipatif; Penjabaran dari Gerakan Tungku Api Kehidupan,” dalam *Gaiya*. Th. Ke-14 Maret-Mei 2018.
- Yulianto, Totok (Kepala KPHL Unit VI Mimika). 2019. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Periode 2019-2028. Mimika: KPHL Unit VI Mimika Provinsi Papua.

